

BAB II

PRESPEKTIF TEORITIS

1. Kajian tentang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian

Secara konseptual, pemberdayaan atau (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ife, sebagaimana dikutip Edi Suharto, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan penguasaan atau penguatan klien atas:

- a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- b) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
- d) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.

- e) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- g) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosial.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah proses dan tujuan, sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupannya.¹

Agar masyarakat dapat berdaya perlu adanya sentuhan pemberdayaan yang tidak menggurui, apalagi mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dengan kata lain, perlu adanya pendekatan pemberdayaan yang bertumpuh pada kekuatan dan potensi masyarakat sendiri. Maka mereka akan merasa dilibatkan dalam membangun,

¹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

merasa berperan dalam menentukan nasibnya sendiri, dan lebih dari itu akan memiliki harapan masa depannya sendiri, dengan apa yang mereka kehendaki.²

Pemberdayaan adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik, lebih kuat etos kerjanya.³

Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa

² Hari Witoyo Suparlan, Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Modul Aktivis Masyarakat*. (Sidoarjo: Yayasan Paramulia, 2006)

³ Ibid...hal. xvii

depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera.⁴

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku dakwah pemberdayaan masyarakat, paradigma aksi metodologi. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansional merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antar subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengukuran subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi dari individu yang semula objek menjadi subjek. Sehingga relasi sosial yang nanti hanya akan dilahirkan dari relasi sosial antar subjek dengan objek lain.⁵

Sunyoto Usman sebagaimana yang dikutip oleh Abu Hurairah dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan bingkai proses usulan perkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.⁶ Dalam proses ini masyarakat didampingi atau membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menentukan alternatif solusi masalah tersebut serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

⁴ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011), Hal.88

⁵ Moh Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hal. 169

⁶ Abu Hurairah, *Pengorganisasian Dan Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: IKAPI, 2008), Hal.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik, kuat dan inovatif tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan sosial.⁷

2. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu:

- a) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

⁷ Rendy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan*, (Jakarta: PT Elex Computindo, 2007), Hal. 57

- e) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari berbagai faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.
- f) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan dari perubahan.
- i) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan membangun ekonomi secara paralel.⁸

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Person seperti dikutip oleh Edi Suharto menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif.

⁸ Edi Suharto, *Membangun...* hal. 68-69

Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan.

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukankah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah bimbingan atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan siarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, menejemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Sistem besar memandang klien klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memiliki situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memiliki serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁹

2. Teori Konflik

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa, teori konflik merupakan teori terpenting pada saat ini, oleh karena penekanannya pada kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dibandingkan di tingkat individual, antar pribadi atau budaya. Sehingga konflik yang terjadi antara seorang warga Muslim dan warga Kristen di Maluku, ditengarai bukanlah merupakan cerminan kebencian pribadi antara mereka, melainkan lebih

⁹ Ibid....hal. 66-67

sebagai cerminan ketidaksesuaian atau oposisi antara kepentingan-kepentingan mereka seperti yang ditentukan oleh posisi mereka dalam masing-masing kelompok agama mereka.

Diantara para perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise status dan kekuasaan politik.

Segi-segi pemikiran filosofis Marx berpusat pada usaha untuk membuka kedok sistem nilai masyarakat, pola kepercayaan dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meskipun dalam pandangannya, orientasi budaya tidak seluruhnya ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, orientasi tersebut sangat dipengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Tekanan Marx pada pentingnya kondisi materiil seperti terlihat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu para pelakunya.

Terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apa pun yaitu antara lain adalah, pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan diantara orang-orang dalam kelas

berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial, merupakan sesuatu hal yang sangat penting.¹⁰

Marx lebih cenderung melihat nilai dan norma budaya sebagai ideologi yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominan untuk membenarkan berlangsungnya dominasi mereka. Selanjutnya, mereka pun berusaha mengungkapkan berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan yang mungkin dikelabui oleh munculnya konsensus nilai dan norma. Apabila konsensus terhadap nilai dan norma ada, para ahli teori konflik menduga bahwa konsensus itu mencerminkan kontrol dari kelompok dominan dalam masyarakat terhadap berbagai media komunikasi (seperti lembaga pendidikan dan lembaga media massa), dimana kesadaran individu dan komitmen ideologi bagi kepentingan kelompok dominan dibentuk

3. Teori Relasi Kuasa

Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain.

¹⁰ Peter Beilharz. *Teori-Teori Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005) Hal 269

Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin“ (*direction*) atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah“ (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguit disebut “pemerintah” (*gouvernants*) dan “yang diperintah”.(*gouvernes*).¹¹

Max Weber mengatakan, kekuasaan (*power*) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial.¹²

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber, membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

¹¹ Edward L. Poelinggomang. *Kerajaan Mori: Sejarah Dari Sulawesi Tengah*. (Morowali. Komunitas Bambu. 2004). Hal. 138.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press.2006). Hal. 268.

- a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.
- b. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini di miliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.
- c. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.¹³

¹³ Doyli Paul Jhonson. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. (Jakarta: PT Gramedia. 1994). Hal. 227-231

Ketiga tipe kekuasaan tersebut menurut Weber salah satunya terdapat di setiap masyarakat. Pemerintahan Desa dalam konteks ini memiliki kekuasaan paling dekat pada poin ketiga yaitu tipe rasional legal, tetapi dalam aplikasinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal Weber.

Etzioni mendefinisikan kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengatasi sebagian atau seluruh penolakan, dan memperkenalkan perubahan ketika terjadi penolakan tersebut. Etzioni melihat manfaat untuk membedakan *assets* dengan kekuasaan. *Asset* merupakan kekuasaan potensial, sedangkan kekuasaan mengacu pada kekuasaan yang aktual.¹⁴

Dalam membahas *asset* dan kekuasaan, Etzioni mengidentifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu;

1. *Asset utilitarian* mencakup berbagai pemilikan ekonomis, kemampuan teknis, administratif, tenaga kerja dan sebagainya. Kekuasaan utilitarian berlaku ketika pemilik *asset* menggunakan kekuasaan agar pihak lain bergabung dengan mereka.
2. *Asset paksaan* adalah persenjataan, instalasi dan tenaga kerja yang dipakai oleh militer, polisi dan sebagainya. Kekuasaan paksaan adalah kekuatan dan hasil – hasil ketika satu unit menggunakan *asset* paksaan untuk memaksakan pada pihak lain ketentuan – ketentuan bertindak.

¹⁴ Margaret M Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta. Raja Wali. 1987). Hal. 364.

Pada masyarakat post-modern arah gerakan selalu berawal dari kekuasaan paksaan menuju ke utilitarian.

3. Asset persuasif yaitu: menurunkan kadar keterasingan (menjurus pada penolakan). Sedangkan kekuasaan persuasif dilaksanakan lewat manipulasi simbol-simbol untuk memobilisir dukungan. Blau memberi batasan kekuasaan sesuai dengan pengertian Weberian, yaitu “kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif”.

Dengan demikian kekuasaan hanya dilihat sebagai pengendalian melalui sanksi-sanksi negatif, dimana kekerasan fisik atau ancamannya merupakan kutub peler dari kekuasaan. Blau mengutip skema Richard Emerson untuk menjelaskan hubungan-hubungan ketergantungan kekuasaan (power-dependence), sebagai dasar untuk menganalisis ketimpangan kekuasaan yang terdapat di dalam dan di antara kelompok-kelompok. Individu yang membutuhkan pelayanan orang lain harus memberikan alternatif berikut ini :

1. Mereka dapat memberikan pelayanan yang sangat di butuhkan hingga cukup untuk membuat orang tersebut memberikan jasanya sebagai imbalan, apabila mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk itu; hal ini akan menjurus pertukaran timbal balik.

2. Mereka dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan itu di mana-mana (dengan asumsi bahwa ada penyedia alternatif), yang menjurus pada pertukaran timbal balik, sekalipun dalam hubungan yang berbeda.
3. Mereka dapat memaksa seseorang menyediakan pelayanan (dengan asumsi orang tersebut mampu melakukannya). Bilamana pemaksaan yang demikian terjadi, maka mereka yang mampu memperoleh pelayanan tersebut menciptakan dominasi terhadap penyedia (supplier).
4. Mereka dapat belajar menarik diri tanpa mengharap pelayanan atau menemukan beberapa pengganti pelayanan serupa itu. Keempat alternatif itu menunjukkan kondisi-kondisi ketergantungan sosial dari mereka yang membutuhkan pelayanan tertentu. Bilamana orang-orang yang menginginkan pelayanan itu tidak mampu memenuhi salah satu dari alternatif tersebut, maka mereka tidak mempunyai pilihan kecuali hanya menuruti kehendak penyedia” sebab kelangsungan persediaan pelayanan yang dibutuhkan tersebut hanya dapat diperoleh sesuai dengan kepatuhan mereka. Ketergantungan ini menempatkan penyedia pada posisi kekuasaan. Agar dapat mempertahankan posisinya penyedia harus tetap bersikap wajar terhadap keuntungan yang diperoleh atas pertukaran pelayanan dan harus merintangi penyedia lain dalam kegiatan pelayanan yang sama”.¹⁵

¹⁵ George rister. *Teori sosiologo modern*. (jakarta: kencana. 2004).

Menurut Robert M. Mac Iver kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah-tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the ruler and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan-kekuasaan.¹⁶

Mac Iver mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul, yaitu bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainnya. Menurut Mac Iver ada tiga pola umum piramida kekuasaan yang terbentuk dalam masyarakat, yaitu:

1. Tipe pertama (tipe kasta) adalah pola kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, di mana hampir-hampir tak terjadi gerak sosial vertikal. Garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tak mungkin ditembus.

¹⁶ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, PT Gramedia, 1982). Hal. 35-36

2. Tipe kedua (tipe *oligarchy*) masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi dasar perbedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama adalah, walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran ascribed status tetapi individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.
3. Tipe ketiga (tipe demokrasi) menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Yang terakhir ini terbukti dari anggota-anggota partai politik, yang dalam suatu masyarakat demokratis dapat mencapai kedudukan-kedudukan tertentu melalui partai.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soerkanto Dan Agus Broto Susilo. *Masyarakat Dan Kekuasaan*. (Jakarta: Rajawali 2000)